

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan sebagai tempat kegiatan pelayanan bertransaksi yang digunakan oleh masyarakat dalam membantu menyimpan dan meminjam uang. Hal ini bertujuan untuk sarana berinvestasi masa depan demi meningkatkan taraf hidup. Sistem yang aman, nyaman, dan dapat dipercaya membuat masyarakat merasa tenang untuk keadaan uang tersebut. Asal muka kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daerah Eropa, kemudian usaha perbankan ini berkembang ke asia barat oleh parah pedagang. Perkembangan perbankan di asia, afrika dan amerika dibawa oleh bangsa eropa pada saat melakukan penjajahan ke Negara jajahannya baik di asia, afrika maupun benua amerika. Jika di telusuri sejarah dikenalnya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu mungkin penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang ini sekarang di kenal nama dengan pedangang valuta asing (*money changer*).

Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposito. Kegiatan bisnis komersial bank terbesar untuk pertumbuhan di dunia perbankan adalah bisnis kredit sebagai sarana pinjaman (*lending*). Bisnis ini banyak sekali memberikan keuntungan namun memberikan risiko yang besar, sebab berpengaruh sekali pada kesehatan dan kelangsungan usaha. Bank salah satunya berfungsi sebagai penyalur dana kepada masyarakat yang kegiatan pemberian kredit ini dibatasi oleh ketentuan Undang-Undang dan ketentuan kebijakan Bank Indonesia. Oleh karena itu,

penyaluran kredit ini selalu diawasi oleh lembaga tertinggi, karena pemberian dana ini harus memiliki kejelasan serta keakuratan data dari debitur.

Walaupun ada juga bank yang bankrut atau hampir bangkrut karena menderita kerugian kegiatan bank yang lain, namun kebanyakan bank yang bangkrut disebabkan karena terjerat kasus-kasus kredit macet dalam jumlah besar. Kehati-hatian ditunjukkan bahwa sudah banyak bank yang telah memiliki manajemen yang baik namun tetap berdampak negative terhadap kualitas kredit bank tersebut. Walaupun manajemen perbankan sudah sangat baik tetapi tanpa didukung budaya kredit yang sehat akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, dalam organisasi perkreditan yang sangat penting adalah bagaimana bank dapat menciptakan situasi dimana para *credit officer* dan semua pejabat yang terkait dapat bekerja secara terorientasi berkesinambungan dengan budaya kredit yang sehat.

Dalam bukunya Irham Fahmi, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi" Perbankan adalah lembaga yang paling begitu rentan atau berdekatan dengan risiko, khususnya risiko yang berkaitan dengan uang (*money*). Posisi perbankan sebagai mediasi yaitu pihak yang menghubungkan mereka yang surplus dan deficit finansial telah menempatkan perbankan harus selalu menjaga hubungan baik dengan kedua pihak tersebut. Keputusan perbankan harus selalu bersifat moderat yaitu mempertimbangkan keinginan dari kedua pihak tersebut karena tanpa kedua pihak tersebut perbankan tidak bisa menjalankan aktivitas secara maksimal. Dalam artian jika perbankan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi karena ia memiliki finansial yang begitu surplus itu juga dianggap tidak baik, karena ia tidak menjalankan fungsinya sebagai *agent of development*. Namun sebaliknya jika ia tidak hati-hati dalam menyalurkan pinjaman maka perbankan sendiri yang akan menerima akibatnya yaitu salah satu timbulnya kredit macet.

Untuk mengelola kredit secara sehat agar terhindar masalah kredit bermasalah, maka dibutuhkan sebuah bumbu-bumbu dari pengetahuan, kemampuan serta ketelitian dalam memberikan kredit yang lancar. Jika bisnis ini dijalankan dengan baik, maka kegiatan industri perbankan akan selalu maju dan berkembang. Setiap

tahun, bisnis perbankan selalu ingin meningkatkan NPAT (*Net Profit After Tax*) atau keuntungan setelah dipotong pajak dari segi bisnis *funding* maupun *lending*. Keuntungan yang didapat digunakan untuk pembayaran beban-beban operasional keseluruhan yang ada.

Perekonomian global dan domestik yang lesu turut berdampak pada kualitas kredit perbankan hingga September 2015. Meskipun nilai pencairan kredit bertambah, namun prestasi tersebut dibarengi dengan peningkatan jumlah kredit bermasalah. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia periode September 2015 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir September 2015 pertumbuhan kredit tercatat sebesar 11,1 persen (*year on year/yoy*) dengan *outstanding* penyaluran kredit mencapai Rp 3.956,48 triliun. Jika dibandingkan posisi akhir tahun lalu (*year to date/ytd*), kredit tersebut tumbuh 7,68 persen. Tak hanya penyaluran kredit yang meningkat, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) oleh perbankan nasional juga tumbuh 11,72 persen (*yoy*) menjadi Rp 4.464,08 triliun. Sementara margin bunga bersih (*net interest margin/NIM*) bank umum meningkat dari 4,21 persen pada September 2014 menjadi 5,32 persen pada September 2015. Sayangnya bank-bank di Indonesia tidak bisa menikmati pendapatan bunga dari tingginya penyaluran kredit tersebut. Meskipun pendapatan bunga bank umum tumbuh 15,69 persen (*yoy*) menjadi Rp 479,01 triliun. Namun sampai September 2015 jumlah laba bersih perbankan mencapai Rp 78,20 triliun, turun 8,4 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 85,37 triliun. Penurunan laba bersih tersebut terjadi pada seluruh kelompok bank, karena meningkatnya biaya pencadangan akibat jumlah kredit macet atau kredit bermasalah bertambah (*non performing loan/NPL*). Jika sampai akhir 2014 jumlah NPL mencapai Rp 79,39 triliun, sekarang sampai September 2015 saja nilai NPL sudah tembus Rp 107,25 triliun. Rasio NPL pun meningkat dari 2,16 persen pada Desember 2014 menjadi 2,7 persen pada September 2015. Penurunan kualitas kredit tersebut membuat bank-bank umum harus menambah biaya pencadangan penurunan kualitas kredit sebesar Rp 142 triliun per September 2015, naik lebih dari dua kali lipat dari biaya pencadangan pada Desember 2014 yang

sebesar Rp 68 triliun yang ditarik dari berita melalui situs cnnindonesia tentang Ekonomi Lesu, Jumlah Kredit Bermasalah Perbankan Melaju.

Pengelolaan bisnis kredit ini hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan Bank Sentral bertugas sebagai pengawas serta memberi kebijakan-kebijakan terkait pemberian kredit tersebut. Sudah banyak persaingan Bank-Bank Umum yang muncul menghadapi era zaman sekarang. Namun, tidak menutup kemungkinan hadirnya Bank Perkreditan Rakyat, mampu menunjukkan eksistensinya yang berperan didalam penjualan Produk Kredit Perbankan. Peranan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Bank BPR berasal dari Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai dan Bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Jenis Produk yang ditawarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat relative sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.

Demi tercapainya visi dan misi yang dijalankan Industri Perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat, dalam pencairan sebuah kredit yang layak dan sehat perlu kewaspadaan dan menganalisa yang baik untuk mencegah adanya kredit bermasalah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pencairan kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan dalam mencegah kredit bermasalah dengan menggunakan analisa 5C. Untuk itu penulis akan membahas hal tersebut ke dalam Skripsi dengan judul **“KELAYAKAN PENCAIRAN KREDIT UNTUK MENCEGAH KREDIT BERMASALAH DI PRODUK KREDIT USAHA MIKRO (KUM) PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMATERA SELATAN”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana mengevaluasi kelayakan pencairan kredit di produk Kredit Usaha Mikro (KUM) untuk mencegah kredit bermasalah pada PT. Bank BPR Sumatera Selatan?”.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Supaya penulisan tugas akhir ini lebih terarah dan tidak terjadi penyimpangan dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi kelayakan pencairan kredit di produk Kredit Usaha Mikro (KUM) untuk mencegah kredit bermasalah pada PT. Bank BPR Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari Skripsi ini adalah

1. Mengevaluasi kelayakan pencairan kredit di produk Kredit Usaha Mikro (KUM) untuk mencegah kredit bermasalah pada PT Bank BPR Sumatera Selatan.
2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma IV (D4) di Politeknik Negeri Sriwijaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap aspek teoritis dan praktis, manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Merupakan kesempatan untuk mempelajari secara langsung dalam praktek kerja yaitu mengadakan analisis pada perusahaan serta menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat selama kuliah dan merupakan syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada jurusan Administrasi Bisnis program studi Manajemen Bisnis di Politeknik Negeri Sriwijaya.

b. Bagi Pembaca

Sebagai informasi pengetahuan dalam mempelajari lebih jauh tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan sebagai bahan perbandingan pada penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, kontribusi, saran dan pertimbangan di dalam mengambil langkah dan kebijakan untuk mencapai tujuan perusahaan.